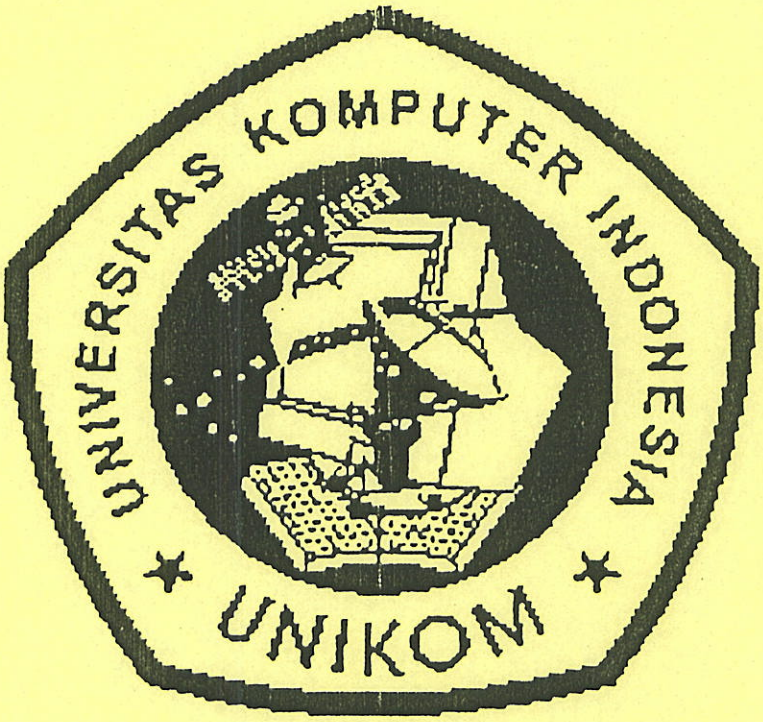
DAFTAR PUSTAKA

Lampiran I Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP- 35/PJ/2000, tentang Tata Cara Penerimaan SPT.

Lampiran II Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP- 35/PJ/2000, tentang Tata Cara Pengolahan SPT.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001*, Andi Yogyakarta, 2001.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan*, Salemba Empat, 2000.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR **1721**

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM ☐☐☐☐

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

B. NAMA PEMOTONG PAJAK :

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :

KOTA/KODE POS : ☐☐☐☐☐

TELEPON / FAX :

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN :

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN .....
2. STATUS SPT ☐
3. N/K/L (F.7) ☐
4. LAMPIRAN ☐
5. KODE KLU ☐☐☐☐

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

	GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3.	J U M L A H (1 + 2)			
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5.	STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6.	J U M L A H (4 + 5)			
7.	a. ☐ PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
	b. ☐ PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
	JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL			

G. PERMOHONAN

PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN ..... TAHUN .....

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. ☐ SURAT SETORAN PAJAK
2. ☐ SURAT KUASA KHUSUS
3. ☐ LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4. ☐ PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
5. .....
6. .....

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

....., TGL .....

☐ PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN

☐ KUASA NAMA TERANG

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

FORMULIR
1721 - A

TAHUN TAKWIM

NAMA PEMOTONG PAJAK : .....

NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	N A M A	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• JUMLAH ➢ ..... ORANG - YANG MEMPUNYAI NPWP ➢ ..... ORANG - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP ➢ ..... ORANG				
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/ THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP ➢ ..... ORANG				
C. J U M L A H A+B ➢ ..... ORANG				

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

- LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A
- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

A. NOMOR URUT :
B. NAMA PEMOTONG PAJAK :
C. NPWP PEMOTONG PAJAK :
D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :
E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :
F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :
G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :
H. JABATAN :
I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : ☐ KAWIN ☐ TIDAK KAWIN ☐ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K./ ..... TK/ .....
K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : ..... S. D. .....

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

	● PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSIUN/THT	1.		
2.	TUNJANGAN PPh	2.		
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3.		
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4.		
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5.		
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh. PASAL 21	6.		
7.	JUMLAH (1 S.D.6)		7.	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		8.	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)		9.	
	● PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10.		
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11.		
12.	IURAN PENSIUN, IURAN THT	12.		
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11+ 12)		13.	
	● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)		14.	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		15.	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		16.	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		17.	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)		18.	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		19.	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		20.	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG		21.	
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		22.	
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 ☐ a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) ☐ b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)		23.	
24.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH ☐ a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN ..... ☐ b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ..... TAHUN		24.	

M. ● ☐ PEMOTONG PAJAK / ☐ KUASA — TANDA TANGAN / NAMA TERANG — ..... TGL. .....

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721 - B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

- LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK : .....

B. NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• **PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL**			
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN. HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ..... ORANG			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ..... ORANG			
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ..... ORANG			
4.	KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ..... ORANG			
5.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ..... ORANG			
6.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ..... ORANG			
7.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ..... ORANG			
	• **PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL**			
8.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ..... ORANG			
9.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ..... ORANG			
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ..... ORANG			
	• **PPh PASAL 26**			
11.	PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ..... ORANG			
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 : ..... ORANG			

CATATAN :
PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ..... ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2):
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721 - C

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK : ..... NPWP : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JENIS KEAHLIAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP. DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP. PPh. 3.2.5 - 98

KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor :
Tanggal :

Nama :
Alamat :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn pajak :

Jenis Pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
Surat diterima : 1. langsung	.....
2. melalui pos	.....

Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....

Uraian	Prf / Tg
PENYIDIKAN	
1. Diberitahukan kepenuntut umum	.....
2. Penyidikan	.....
3. Selesai disidik	.....
4. Disampaikan kepenuntut umum	.....
PENETAPAN	
1. S T P	.....
2. S K P N	.....
3 S K P K B	.....
4. S K P K B T	.....
5. S K P L B	.....
RESTITUSI	
1. S K P K P P	.....
2. S P M K P	.....
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan keinduk berkas	.....
2. Diteruskan ke :	.....
.....	
3. Diterima kembali	.....

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....

PENGELOLAAN
SPT. Tahunan PPh / masa PPN

Uraian	Prf / Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q - 1	.....
2. Selesai di-Edit	.....
3. Selesai direkam	.....
4. Dicatat pada 1Q - 2	.....
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap	.....
7. Sederhana :	
7.1. Lapangan	.....
7.2. Kantor	.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
Alamat :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak :

Jenis Pajak :

Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA

LEMBAR PENGHITUNGAN

(X) STP ( ) SKP ( ) SKPT ( ) SKKP

1. PERIHAL

NAMA WAJIB PAJAK :

N P W P : ☐☐☐☐☐☐☐ 422

ALAMAT :

II. URAIAN

Berdasarkan data administrasi Pengawasan Pembayaran dan Pengawasan Laporan :

Wajib pajak tersebut diatas tidak / terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan/PPh Orang Pribadi/PPh Pasal 21, Tahun Pajak : 20.....

Dari uraian ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, diusulkan untuk diterbitkan STP dengan perhitungan sebagai berikut :

Sanksi Denda / Bunga UU No. 9 Tahun 1994

Pasal 7 : **Rp. 50.000,-**

JUMLAH **Rp. 50.000,-**

(Lima puluh ribu rupiah)

Bandung, ... 20 .....

DITELITI
KASUBSI SPT

PENGHITUNG

Nip.

Nip.

MENYETUJUI/MENETAPKAN
KEPALA SEKSI TUP

Nip.

Lampiran 4

KODE NOTA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
BANDUNG - TEGALLEGA

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

[1] STP [2] SKPKB [3] SKPKBT [4] SKPLB [5] SKPN

Jenis Pajak : [1] ORANG PRIBADI [2] BADAN

Nomor Ketetapan/Keputusan :
Tgl. Penerbitan :
Tgl. Jatuh Tempo :

Masa Pajak :
No. Tanggal Permohonan (LB) :
Tgl. SPT Lengkap Disampaikan :
Tgl. Pemeriksaan :
Tahun Pajak :
Tahun Buku :
No. LPP/LHPM :

Nama :
NPWP :
Pekerjaan / Usaha :
Alamat :
KLU (5 digit) :
Kode Pos :

Cara Penghitungan Penghasilan [a] Pembukuan / [b] Norma Penghitungan

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
1. Peredaran Usaha		
2. Harga Pokok Penjualan		
3. a. Laba / Penghasilan Bruto usaha (1-2) atau penghasilan Neto dari usaha b. Penghasilan jasa / pekerjaan bebas		
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		
d. Jumlah (a + b + c)		
4. Pengurangan Penghasilan bruto/biaya perusahaan, biaya jabatan/pensiun iuran pensiun, dan iuran THT		
5. Jumlah penghasilan neto : dari usaha / sehubungan dengan pekerjaan (3.d. - 4)		
6. Penghasilan dari luar usaha :		
a. Penghasilan Neto luar negeri		
b. Penghasilan Neto : dari luar usaha / penghasilan lainnya		
c. Jumlah (a + b)		
7. Jumlah Penghasilan Neto (5 + 6.c.)		
8. a. Kompensasi kerugian b. Penghasilan Tidak Kena Pajak		
9. Penghasilan Kena Pajak (7 - 8.a. - 8.b.)		
10. PPh Terutang		

KP. PPh. 0/BNP-95

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
11. Kredit Pajak : a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain : a.1. PPh Pasal 21		
a.2. PPh Pasal 22		
a.3. PPh Pasal 23		
a.4. Lain - lain		
a.5. Jumlah (a.1. + a.2. + a.3. + a.4.)		
b. Dibayar sendiri b.1. PPh Pasal 22		
b.2. PPh Pasal 24		
b.3. PPh Pasal 25		
b.4. PPh Pasal 29		
b.5. Lain - lain		
b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)		
c. Diperhitungkan c.1. STP (Pokok)		
c.2. SKPKB (Pokok)		
c.3. SKPKBT (Pokok)		
c.4. SKPLB		
c.5. Jumlah (c.1. + c.2. + c.3. + c.4.)		
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a.5. + b.6. + c.5)		
12. Pajak Penghasilan yang : [a.] Kurang bayar (10 - 11.d.) / [b.] Lebih bayar (11.d. - 10) / [c.] NIHIL (10 = 11.d.)		
13. Sanksi administrasi : a. STP a.1. Denda Pasal 7 KUP		
a.2. Denda Pasal 8 (2) KUP		
a.3. Bunga Pasal 8 (3) KUP		
a.4. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP		
a.5. Bunga Pasal 19 (3) atau Pasal 14 (3) KUP		
b. SKPKB b.1. Kenaikan Pasal 8 (5) KUP		
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) hurup b KUP		
b.3. Bunga Pasal 13 (2) KUP		
c. SKPKBT c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP		
c.2. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)		
14. Jumlah yang : [a.] Masih harus dibayar (12 + 13.d.) / [b.] Lebih bayar (12.b.) / [c.] NIHIL (12.c.)		

(.....)

.....

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUAR	EKSPEDISI	ARSIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN

Nomor :

Masa / Tahun Pajak :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama :

NPWP :

II. Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Angsuran Pajak / Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar		Rp.
3. Kurang dibayar		Rp.
4. Sanksi Administrasi :		
a.	Rp.	
b.	Rp.	
c.	Rp.	
d. Jumlah sanksi administrasi		Rp.
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.d)		Rp.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh O/B/TP-95

LEMBAR **1**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh
Rp. .....

Terbilang : .....
Diisi dengan huruf .....
.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

LEMBAR **2**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

LEMBAR **3**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

LEMBAR **5**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf .....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

KP. PDIP. 5.1.-98

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA BAGIAN BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA
Jln. Soekarno Hatta No. 216 Bandung

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi
UNIKOM
di Bandung

13 Februari 2002

SURAT KETERANGAN
Nomor: KET- 147 WPJ.09/KP.0601/2002

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NINA YUNIAWATI
NPM	: 213.99025
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega mulai tanggal 3 September 2001 sampai dengan tanggal 30 September 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Kantor
U.b. Kasubbag. Umum
U.b. Korlak Kepegawaian

AMIR HASAN SANTOSA
NIP. 060031821

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : ONY WIDILESTARININGTYAS, S.E
NIP : 4127.34.03.004
Jabatan : Dosen Pembimbing

Menyatakan bahwa :

Nama : NINA YUNIAWATI
NIM / NIRM : 21399025
Jurusan / Jenjang : Akuntansi/D-III

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 3 September **Sampai dengan tanggal** 30 September 2001 **pada Bidang Kajian :** Perpajakan

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(85)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(85)	B = Baik
3. Kreativitas	(85)	C = Cukup
4. Laporan	(85)	D = Kurang
Total Nilai	(340)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{340}{4} = 85$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, Maret 2002

Dosen Pembimbing

Ondtyas,-

(ONY WIDILESTARININGTYAS)

*) Lingkari yang cocok.

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Tugas Membimbing Kerja Praktek
No: 194 /Dekan/Int/FE/ x /2001

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia dengan ini memberi tugas membimbing kerja praktek kepada :

1. Nama : Ony Widilestariningtyas, SE
   Sebagai Pembimbing

Dalam penyusunan/penelitian laporan kerja praktek untuk dan atas :

Nama : Nina Yuniawati
NIM/Jurusan : 21399025/Akuntansi
Program Studi : D-III
Judul : Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PPh Pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tegalega

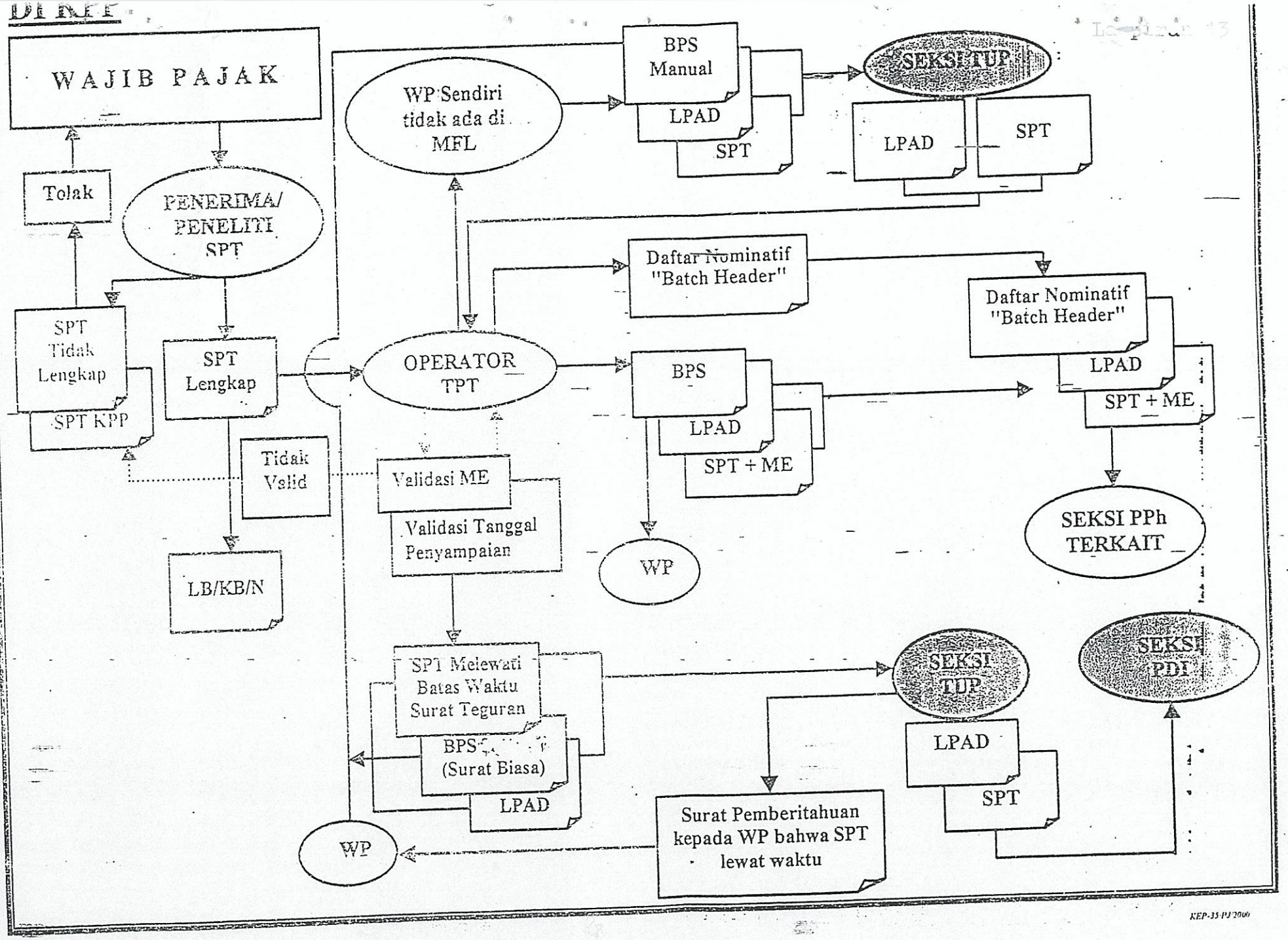
Surat tugas ini berlaku sampai dengan laporan kerja praktek selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan surat tugas ini.
Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 30 Oktober 2001
Dekan,

Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, MS., Ak

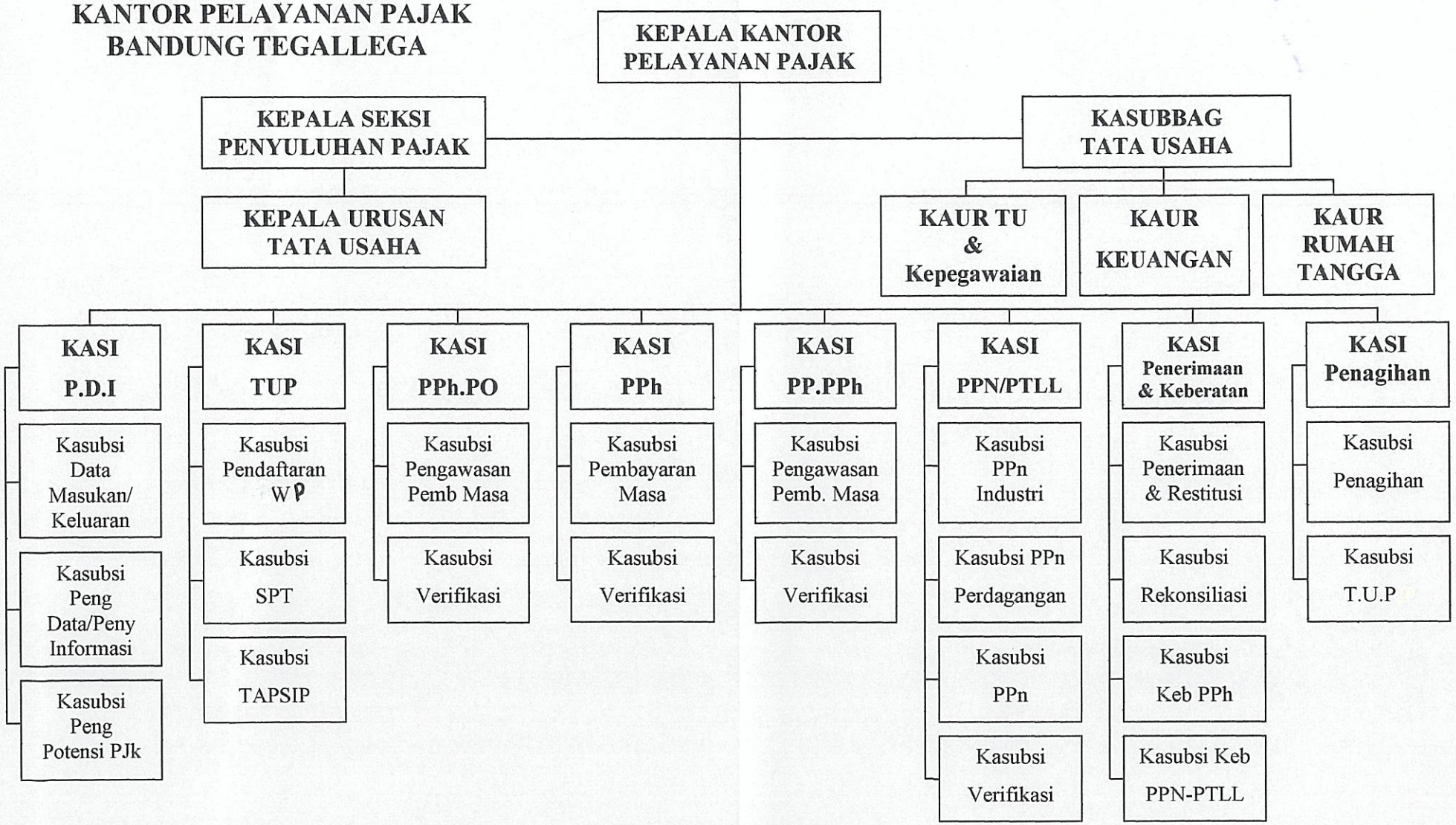
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Rektor UNIKOM.
2. PR I & PR II UNIKOM.
3. Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Kepala BAAK UNIKOM.
5. Pembimbing.
6. Arsip

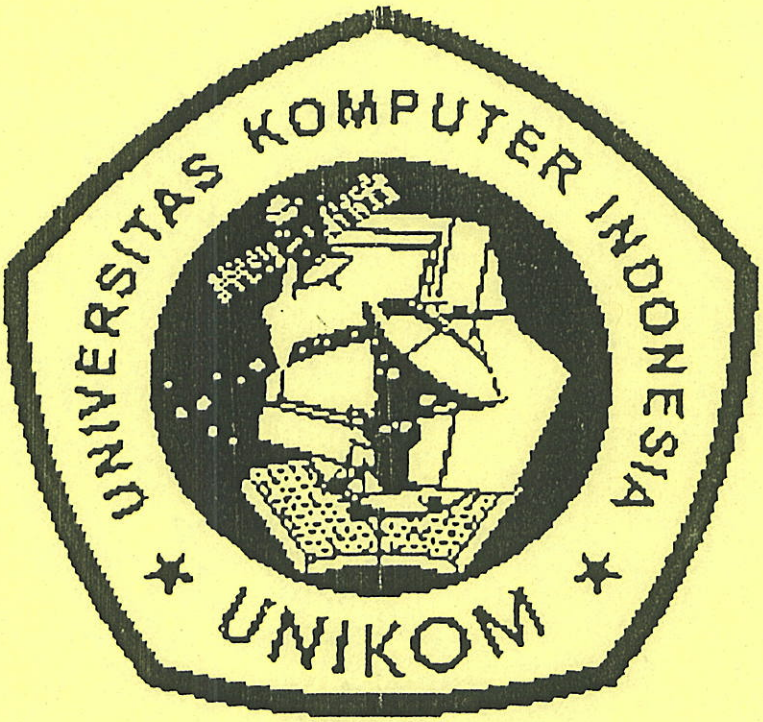
Website : http://www.unikom.ac.id



Bagan Penerimaan KPP-WP

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK
BANDUNG TEGALLEGA




UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi.

Nama	: Nina Yuniawati.
Tempat Tanggal Lahir	: Serang, 7 Juni 1981.
Agama	: Islam.
Alamat Asal	: Jl. Panglima Polim No. 61 Cilegon.
Telepon	: (0254) 392216.
Alamat di Bandung	: Sekeloa Selatan No. 47.
Hobi	: Menonton TV, Jalan-jalan.

Data Pendidikan

1987 – 1993	: LULUSAN SDN II CILEGON.
1993 – 1996	: LULUSAN SMPN I CILEGON.
1996 – 1999	: LULUSAN SMUN I CILEGON.
1999 – 2002	: Tercatat sebagai mahasiswa program studi D-III jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKOM.